

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ialah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dan terjadi secara terus menerus dengan tujuan guna menciptakan masyarakat yang berkeadilan, berdaya saing, dan sejahtera. Pembangunan dapat dilakukan pada berbagai bidang seperti bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik, serta bidang budaya dimana upaya pembangunan tersebut dilakukan secara terus menerus agar kesejahteraan yang ingin tercapai dapat terwujud.² Untuk mewujudkan tercapainya pembangunan yang lebih baik maka masyarakat maupun pemerintah harus saling bekerja sama sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara maksimal.

Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak pulau dan provinsi dengan beragam suku, budaya serta berbagai macam sumber daya alam yang melimpah tentunya dapat mendukung pesatnya pembangunan. Berbagai strategi pembangunan ekonomi dan pemerataan ekonomi telah dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi pada kenyataannya, dengan adanya perbedaan geografis dan keberagaman suku maupun budaya justru menjadi penghambat dalam pembangunan. Salah satu penghambat pembangunan dalam bidang sosial adalah adanya kemiskinan. Ini dapat terjadi dikarenakan adanya

² Christea Frisdiantara dan Mukhlis, *Ekonomi Pembangunan: Sebuah Kajian Teoretis dan Empiris*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 1.

perbedaan sumber daya, kemampuan, maupun kesempatan yang dimiliki untuk meningkatkan standar kehidupan di masyarakat.

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seorang individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.³ Kemiskinan juga termasuk dalam masalah yang sifatnya multidimensi, dimana kemiskinan ini dapat ditandai dengan adanya keterbelakangan dan pengangguran yang akhirnya dapat memicu adanya ketimpangan pendapatan masyarakat dan kesenjangan sosial bagi penduduk.⁴ Kemiskinan ini membawa dampak bagi kehidupan masyarakat yang mengalaminya diantaranya yaitu kekurangan gizi, angka kematian yang meningkat, tindakan kriminal yang semakin meningkat, hingga munculnya berbagai konflik di masyarakat.

Tjokrowinoto mengungkapkan bahwa

Kemiskinan tidak hanya menyangkut masalah kesejahteraan semata tetapi kemiskinan juga menyangkut persoalan kerentanan, ketidakberdayaan, tertutupnya akses peluang kerja, mengabdikan sebagian besar pengasilan hanya untuk kebutuhan konsumsi, angka ketergantungan yang tinggi, rendahnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan yang terefleksi dalam budayakemiskinan yang diwariskan dari generasi ke generasi.⁵

Dibeberapa negara, adanya kemiskinan ditandai dengan adanya kelaparan, kekurangan gizi, tidak mempunyai tempat tinggal, tidak bisa bersekolah, maupun tidak mempunyai akses air bersih dan listrik untuk kebutuhan sehari-harinya. Sementara ciri yang paling menonjol dari

³ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 9.

⁴ Ali Khomsan, dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hal. 5.

⁵ Alifiulahtin Utaminingsi dkk, *Feminisasi Kemiskinan Dan Pemberdayaan Perempuan Berperspektif Sosiopsikologis*, (Malang: UB Press, 2020), hal. 2.

kemiskinan di Indonesia yang pertama yaitu masih banyak rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan nasional, Kedua, ukuran kemiskinan yang didasarkan pada pendapatan yang diperoleh. Dan ketiga, adanya perbedaan antar daerah di Indonesia.⁶

Kemiskinan di Indonesia diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Dari Undang-Undang tersebut dapat dipahami bahwa negara tidak hanya diam melihat kemiskinan yang terjadi pada penduduknya akan tetapi mereka ikut menunjang masyarakat yang kurang mampu dengan menyalurkan bantuan sosial. Akan tetapi pemerintah masih belum optimal dalam menerapkan pasal tersebut. Terbukti dengan masih banyak fakir, miskin, dan anak-anak terlantar yang berada di pinggir jalan yang mengemis, mengamen, bahkan ada yang mencopet. Dan biasanya mereka tinggal di kolong jembatan karena tidak mempunyai rumah.

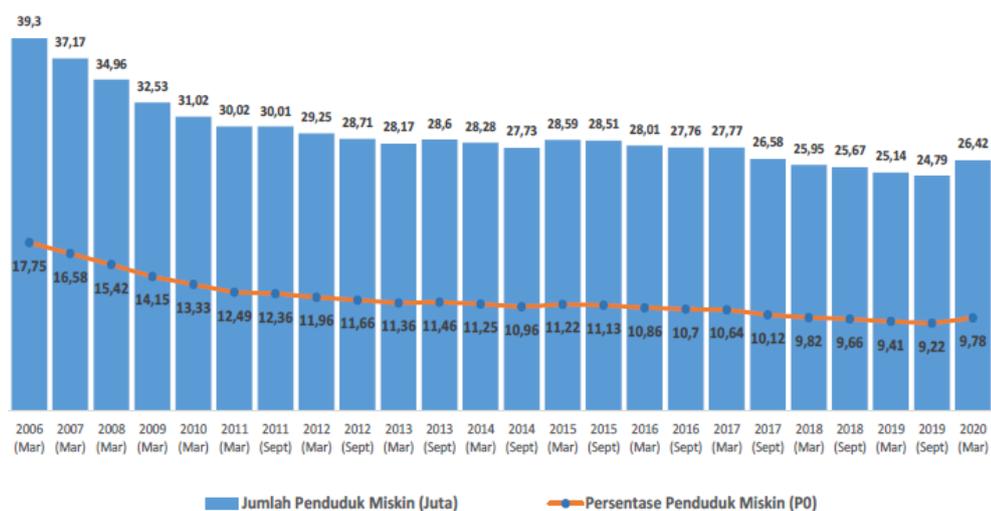
Upaya serius pemerintah Indonesia untuk mengatasi adanya kemiskinan sudah dilakukan sejak masa Orde Baru. Dimana selama periode 1976-1996, tingkat kemiskinan di Indonesia menurun secara drastis dari 40% menjadi 11%. Setiap tahun di Indonesia jumlah penduduk miskin cenderung menurun. Akan tetapi pada masa krisis moneter di tahun 1998 kemiskinan kembali naik menjadi 24,2%, namun ditahun-tahun berikutnya sudah dapat terkendali

⁶ Ali Khomsan, dkk, *Indikator Kemiskinan...*, hal. 6.

kembali, meskipun sempat naik di tahun 2002, 2005, 2006, 2013, 2015, dan 2017.⁷

Berikut ini data kemiskinan di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik mulai dari 2006- 2020, yaitu:

Gambar 1.1 Data Kemiskinan di Indonesia



Sumber: BPS Indonesia

Penurunan tingkat kemiskinan ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menurunkan tingkat kemiskinan adalah dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Meskipun kedua program tersebut ditujukan untuk rumah tangga miskin akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua penerima bantuan tersebut merupakan rumah tangga miskin.

⁷ Ambaranie Nadia, “Membandingkan Angka Kemiskinan dari Era Soeharto hingga Jokowi”, dalam <https://amp.kompas.com/> yang diakses pada tanggal 29 November 2020.

Data Susenas menunjukkan bahwa lebih dari 65% rumah tangga miskin tidak menerima BNPT. Yang berarti masih terdapat bantuan dari pemerintah yang tidak tepat sasaran (tepat orang, tepat jumlah, dan tepat waktu) sehingga akan menghambat keberhasilan dari program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah.⁸

Kemiskinan ini dapat terjadi salah satunya karena dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Penduduk ialah semua orang yang bertempat tinggal di daerah Indonesia dalam waktu enam bulan atau lebih serta yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi tujuannya untuk menetap.⁹ Salah satu unsur penting dalam suatu kegiatan perekonomian adalah adanya penduduk dikarenakan dapat menyediakan tenaga kerja untuk menunjang kegiatan-kegiatan dalam perekonomian. Jumlah penduduk yang meningkat apabila diimbangi dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia tentunya akan menjadi modal yang besar dalam suatu pembangunan, akan tetapi apabila kualitas sumber daya manusia yang dimiliki masih rendah maka justru akan menambah beban dalam pembangunan.

Dalam teori Malthus menyebutkan bahwa “pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung.”¹⁰ Dalam teori tersebut menekankan pentingnya keseimbangan antara penambahan jumlah penduduk menurut deret ukur dan ketersediaan pangan menurut deret hitung. Sehingga jumlah penduduk memiliki pengaruh

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, “*Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Trenggalek 2020*, (Trenggalek: Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, 2021), hal. 72.

⁹ Badan Pusat Statistik dalam <https://www.bps.go.id/> yang diakses pada 13 Juni 2020.

¹⁰ Agustina Bidarti, *Teori Kependudukan*, (Bogor: Lidan Bestari, 2020), hal. 17.

terhadap kemiskinan, dimana apabila jumlah penduduk semakin bertambah maka tingkat kemiskinan juga akan bertambah dikarenakan penduduk mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan makanan.

Jumlah penduduk yang tinggi juga dapat membawa dampak negatif dalam masyarakat diantaranya lahan tempat tinggal yang semakin sempit begitupun juga dengan lahan pertanian sehingga ketersediaan pangan akan semakin menipis sehingga akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jumlah penduduk yang tinggi juga dapat meningkatkan angka pengangguran, semakin banyaknya polusi dan limbah yang berasal dari industri sehingga akan memicu timbulnya berbagai macam penyakit.

Tingkat pendidikan masyarakat juga dapat mempengaruhi kemiskinan. Pendidikan sendiri menuntut apa yang sudah terdapat di diri seseorang supaya selaku makhluk yang berakal serta salah satu bagian dari masyarakat mampu menggapai keamanan dan kebahagiaan.¹¹ Pendidikan ini perlu diperhatikan lebih lanjut karena dengan sistem pendidikan yang baik maka masyarakat dapat memiliki pengetahuan yang lebih luas. Dengan adanya pendidikan yang baik diharapkan akan mampu untuk memunculkan generasi bangsa yang berkualitas dan dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat. Apabila tingkat pendidikan masyarakat rendah maka mereka akan tertinggal dalam berbagai hal dengan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Menurut Simmons, “pendidikan di banyak

¹¹ Stefanus M. Marbus, *Psikologi Pendidikan*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hal. 10.

negara merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan.”¹² Dimana apabila memiliki pendidikan yang tinggi maka akan mempunyai pekerjaan yang baik dan mempunyai penghasilan yang tinggi sehingga kemiskinan dapat dihindari dan sebaliknya apabila pendidikannya rendah maka akan sulit mendapatkan pekerjaan dan penghasilan sehingga kemiskinan semakin tinggi.

Hal lain yang dapat mempengaruhi adanya kemiskinan yaitu pengangguran. Dimana pengangguran yaitu orang yang tidak punya suatu pekerjaan atau dalam pencarian kerja. Yang tergolong pengangguran yaitu ia yang memasuki usia kerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan.¹³ Bagi orang yang mengalami pengangguran maka dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi maupun sosial. Pengangguran dapat terjadi karena adanya perbedaan antara jumlah angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia. Sehingga apabila angkatan kerja tumbuh cepat namun pertumbuhan lapangan kerja relatif lambat maka pengangguran akan semakin bertambah. Orang yang menganggur harus mengurangi konsumsi sehari-harinya untuk melangsungkan kehidupannya sehingga akan meningkatkan jumlah penduduk yang miskin. Selain itu efek dari pengangguran dapat mengganggu kesehatan baik kesehatan fisik maupun psikologis.¹⁴

¹² Saharuddin Didu dan Ferri Fauzi, “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lebak”, *Jurnal Ekonomi – Qu*, Vol. 6 No. 1, 2016, hal. 104.

¹³ Amiruddin Idris, *Ekonomi Publik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 120.

¹⁴ Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 2015), hal. 14.

Nugroho menyebutkan bahwa “pengangguran menunjukkan hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.”¹⁵ Menurutnya pengangguran dapat mengurangi pendapatan yang diterima masyarakat dan akan mengurangi tingkat kesejahteraan yang dimiliki. Apabila pengangguran semakin bertambah maka akan berpengaruh terhadap kemiskinan yaitu akan meningkatkan penduduk miskin dan begitu pula sebaliknya apabila pengangguran menurun kemiskinan yang terjadi juga akan menurun.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan ialah pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan meningkatkan suatu perekonomian dalam memproduksi suatu barang maupun jasa.¹⁶ Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi karena adanya faktor produksi yang baik, investasi yang dapat menambah modal dan teknologi juga berkembang, serta tenaga kerja bertambah yang diimbangi dengan pendidikan dan keterampilan yang meningkat. Di suatu negara syarat utama dalam menurunkan tingkat kemiskinan yaitu dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, jika tidak diimbangi dengan pemerataan yang baik maka penurunan tingkat kemiskinan tidak akan pernah terjadi. Menurut Barika “pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang disertai

¹⁵ I Komang Agus dan Sudarsana, "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali", E-Jurnal EP Unud, vol. 7 no.3, 2018, hal. 419.

¹⁶ Patta Rapanna dan Zulfikry, *Ekonomi Pembangunan*, (Makassar: CV. Sah Media, 2017), hal. 7.

dengan pemerataan hasil pertumbuhan dari sektor usaha sangat diperlukan dalam usaha menurunkan tingkat kemiskinan”.¹⁷

Sedangkan Kuznet berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dimana pada tahap awal tersebut distribusi pendapatan cenderung rendah dan pada saat mendekati tahap akhir pertumbuhan ekonomi meningkat dan jumlah orang yang mengalami kemiskinan berangsur-angsur berkurang karena pada tahap tersebut distribusi pendapatan berangsur-angsur membaik.¹⁸

Peneliti tertarik untuk mengambil tempat penelitian di Kabupaten Trenggalek dikarenakan Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia tepatnya di Provinsi Jawa Timur yang tidak lepas dari persoalan kemiskinan. Namun seiring dengan berjalannya waktu Kabupaten Trenggalek terus melakukan kemajuan untuk mengentaskan kemiskinan sesuai dengan visi dari Kabupaten Trenggalek sendiri yaitu terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang maju, adil, sejahtera, berkepribadian, berlandaskan iman dan takwa. Kabupaten Trenggalek memiliki luas wilayah 1.261,40 km², dimana 2/3 wilayahnya merupakan wilayah pegunungan sedangkan 1/3 wilayahnya adalah dataran rendah. Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 kecamatan yang terdiri dari 152 desa serta 5 kelurahan.

¹⁷ Ni Putu, I ketut, et. al, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Bali*, Piramida, Vol. XII No. 1, 2016, hal. 104.

¹⁸ Istiana Mastuchah dan Muliaman, *Sustainable Financing*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2015), hal. 19.

Berikut ini data tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek mulai dari tahun 2015-2019, yaitu:

Tabel 1.1 Persentase Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase penduduk miskin (%)	13,38	13,24	12,96	12,02	10,98

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek

Dalam 5 tahun terakhir tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek cenderung mengalami penurunan dimana penurunan terbesar terjadi di tahun 2018 yaitu dari 12,96% (89,77 ribu penduduk) di 2017 menjadi 12,02% (83,50 ribu penduduk) di 2018. Kemudian di tahun 2019 mengalami penurunan lagi sehingga menjadi 10,98% atau 76,44 ribu penduduk.¹⁹

Dengan keadaan yang terjadi di Kabupaten Trenggalek maka peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti dengan judul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek”.

B. Identifikasi Masalah

1. Jumlah penduduk yang tinggi dan tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dapat menyebabkan adanya kesenjangan penduduk.
2. Tingkat pendidikan masyarakat yang tergolong rendah menyebabkan kurangnya pengetahuan serta keterampilan masyarakat.
3. Banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dapat mempengaruhi kurangnya pendapatan masyarakat.

¹⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek dalam <https://trenggalekkab.bps.go.id/> yang diakses pada 28 November 2020.

4. Pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif tentunya berkaitan dengan produktivitas dan pendapatan masyarakat.
5. Meskipun tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, namun kemiskinan masih perlu diwaspadai agar tidak memicu meningkatnya kemiskinan.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh antara jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek?
2. Apakah terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek?
3. Apakah terdapat pengaruh antara pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek?
4. Apakah terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek?
5. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara jumlah penduduk, tingkat pendidikan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh antara jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.

3. Untuk menganalisis pengaruh antara pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.
4. Untuk menganalisis pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.
5. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan antara jumlah penduduk, tingkat pendidikan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, maka diharapkan dapat memberi beberapa manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Melalui penelitian ini maka diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap kajian di bidang ekonomi makro terkait dengan kemiskinan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pemerintah.

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan untuk bahan referensi dan evaluasi mengenai masalah kemiskinan dan dapat dijadikan bahan untuk menetapkan strategi mengenai pengentasan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.

- b. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan referensi untuk mahasiswa lain maupun masyarakat luas yang ingin

mengetahui tentang kemiskinan dan memberikan kontribusi perbendaharaan kepustakaan di FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam), Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (IAIN Tulungagung).

c. Bagi peneliti selanjutnya.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan tema yang sama akan tetapi dengan menggunakan variabel yang berbeda.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian.

Ruang lingkup yang ada pada penelitian ini dibatasi yaitu hanya dengan menggunakan 2 variabel yaitu variabel *independent* (X) dan variabel *dependent* (Y). Variabel *independent* terdiri dari jumlah penduduk, tingkat pendidikan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel *dependent* ialah variabel tingkat kemiskinan.

2. Keterbatasan penelitian.

Keterbatasan penelitian digunakan untuk mengantisipasi ketidakjelasan dan melebarnya penelitian. Batasan penelitian ini meliputi terbatasnya tenaga, waktu, maupun biaya yang digunakan untuk melakukan penelitian dan terbatasnya variabel makroekonomi yang menjadi indikator untuk mempengaruhi tingkat kemiskinan. Peneliti fokus pada variabel jumlah penduduk, tingkat pendidikan, pengangguran

dan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.

G. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini diperlukan adanya penegasan istilah dari judul “pengaruh jumlah penduduk, tingkat pendidikan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek” agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman. Maka dari itu, penulis menjabarkan penegasan istilah mengenai judul tersebut yaitu:

1. Definisi konseptual

a. Jumlah Penduduk (X1)

Penduduk dapat diartikan sebagai semua orang yang bertempat tinggal di daerah Indonesia selama enam bulan atau lebih dan yang bertempat tinggal kurang dari enam bulan akan tetapi bertujuan untuk menetap.²⁰

b. Tingkat Pendidikan (X2)

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, ataupun pemerintah dengan kegiatan seperti bimbingan, pengajaran, serta pelatihan yang dilakukan di sekolah maupun diluar sekolah yang berlangsung seumur hidup guna mempersiapkan para peserta didik untuk masa mendatang.²¹

²⁰ Badan Pusat Statistik dalam <https://www.bps.go.id/> yang diakses pada 25 Oktober 2020.

²¹ Amos Neolaka dan Grace A, *Landasan Pendidikan: Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 11.

c. Pengangguran (X3)

Pengangguran dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana individu yang tergolong sebagai angkatan kerja dan ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkan pekerjaan tersebut.²²

d. Pertumbuhan Ekonomi (X4)

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.²³

e. Tingkat Kemiskinan (Y)

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, dan kurangnya kesempatan berusaha.²⁴

2. Definisi operasional

Secara operasional penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan variabel jumlah penduduk, tingkat pendidikan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Jumlah penduduk merupakan jumlah orang yang bertempat tinggal dan menetap disuatu daerah dengan waktu yang lama. Tingkat pendidikan adalah tingkat dimana seseorang terakhir menempuh pendidikannya di pendidikan formal. Pengangguran merupakan individu yang tidak bekerja dan hanya

²² Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori...*, hal. 13.

²³ *Ibid*, hal. 9.

²⁴ Ali Khomsan, dkk, *Indikator Kemiskinan...*, hal. 1.

berdiam diri tanpa melakukan apapun. Pertumbuhan ekonomi ialah kenaikan jumlah barang dan jasa secara terus menerus dalam jangka panjang. Sedangkan tingkat kemiskinan merupakan keadaan dimana seorang individu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

1. Bagian Awal

Pada bagian ini meliputi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, serta abstrak.

2. Bagian Utama

Bab I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika skripsi.

Bab II Landasan Teori, yang meliputi teori tingkat kemiskinan, teori jumlah penduduk, teori tingkat pendidikan, teori pengangguran, teori pertumbuhan ekonomi kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, serta hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian, yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel, dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, yang meliputi deskripsi lokasi penelitian, deskripsi responden, deskripsi variabel, dan pengujian data (uji keabsahan data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji t dan uji f).

Bab V Pembahasan, yang meliputi pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

Bab VI Penutup, yang meliputi kesimpulan, dan saran atau rekomendasi.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini meliputi daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.